



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SHOLIH**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **34317**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 843.792.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/75 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 122.625.000
2. Tanah Seluas 3011 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 30.110.000
3. Tanah Seluas 324 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/150 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 133.025.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m2/100 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 169.032.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/70 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 349.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 697.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOBIL, MITSUBIZHI XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 494.612.945

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.035.404.945

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.035.404.945

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.